

# Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

## Catatan Jurnal Perempuan

Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

### Artikel

Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan Representasi Perempuan Pekerja Migran?

*Trisna Dwi Yuni Aresta & Titi Anggraini*

Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran Pada Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan

*Ayu Kusumastuti*

Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai Arena Aktivisme Perempuan Pekerja Migran Indonesia

*Wahyu Susilo*

Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Parlemen: Peluang dan Tantangan

*Ana Sabhana Azmy*

10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran:

Pemenuhan Hak atas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih Terbatas

*Savitri Wisnu Wardhani*

Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

*Ikhaputri Widiyanti & Abby Gina Boang Manalu*

Diterbitkan oleh:

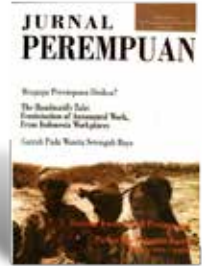
YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

## Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

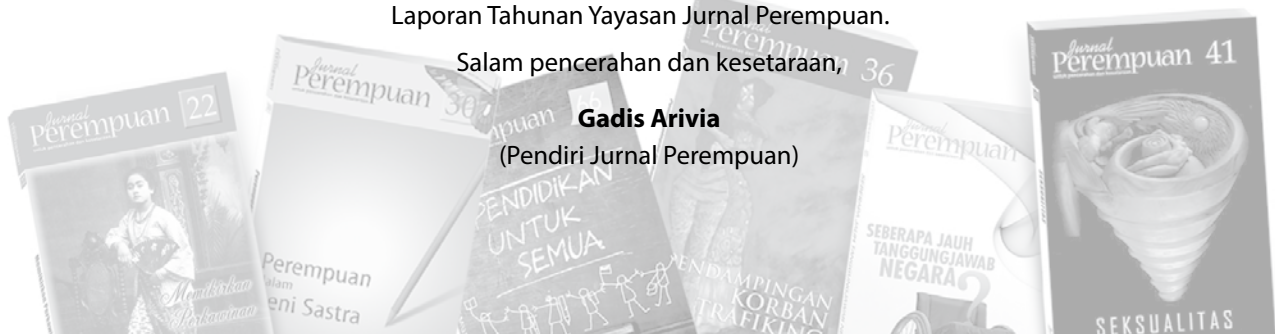
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah  
(Hp 081807124295, email: [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Prof. Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Ratna Syafrida Dhanny (Alm.)  
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

**DEWAN PENGAWAS**

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)  
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)  
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)  
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)  
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)  
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)  
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)  
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)  
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

**REDAKSI**

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.  
Andi Misbahul Pratiwi, S.T., M.Si.  
Retno Daru Dewi G. S. Putri, M.A., M.Hum.  
Nada Salsabila, S.Hum.  
Putu Gadis Arvia Puspa, S.I.Kom.

**SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING**

Himah Sholihah

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**HOTLINE PELANGGAN**

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

**ALAMAT REDAKSI**

Alamanda Tower, 25<sup>th</sup> Floor  
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan  
Telepon: (+62) 21 2965 7992  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

Instagram: @jurnal\_perempuan

Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

Twitter/X: @jurnalperempuan

Youtube: Video Jurnal Perempuan

**WEBSITE**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[www.indonesiafeministjournal.org](http://www.indonesiafeministjournal.org)

Cetakan pertama, 2024

## **Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi**

1. Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
2. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.
3. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
4. Dr. Ida Ruwaida, M.Si.
5. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
6. Dr. Nur Iman Subono
7. Dr. Pinky Saptandari
8. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
9. Mariana Amiruddin, M.Hum.
10. Yacinta Kurniasih, M.A.

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia/*The Political Rights of Indonesian Women Migrant Workers* ..... v-vi  
Abby Gina Boang Manalu

### Artikel

- Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan Representasi Perempuan Pekerja Migran?/  
*Women Migrant Workers in Overseas Elections: Where Are Their Voices, Aspirations, and Representation?* ..... 89-101  
Trisna Dwi Yuni Aresta & Titi Anggraini
- Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran pada  
Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan/*The Dynamics of Political Passivity: Political Engagement  
Preferences of Migrant Domestic Workers in Electoral Processes in Host Countries* ..... 103-111  
Ayu Kusumastuti
- Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai Arena Aktivisme Perempuan Pekerja Migran Indonesia/  
*Indonesian Overseas Elections as an Arena of Activism for Indonesian Women Migrant Workers* ..... 113-125  
Wahyu Susilo
- Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Parlemen: Peluang dan Tantangan/  
*Political Representation of Indonesian Migrant Women Workers (PPMI) in Parliament:  
Opportunities and Challenges* ..... 127-140  
Ana Sabhana Azmy
- 10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan Hak atas Perlindungan  
Pekerja Migran Indonesia masih Terbatas/*10 Years of Jokowi's Policy on the Protection of Migrant Workers:  
Fulfillment of the Right to Protection for Indonesian Migrant Workers is still Limited* ..... 141-156  
Savitri Wisnu Wardhani
- Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia/  
*Affection and Political Awareness of Indonesian Migrant Women Workers* ..... 157-167  
Ikhaputri Widiyanti & Abby Gina Boang Manalu

**INKLUSI**

Kemitraan Australia - Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif



**MIGRANT CARE**  
Perkumpulan Indonesia  
untuk Buruh Migran Berdaulat

#### Publication Disclaimer

Publikasi ini Jurnal Perempuan 118 Hak Politik Perempuan Migran telah disusun dan dicetak oleh Migrant CARE - Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.



# Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

## *The Political Rights of Indonesian Women Migrant Workers*

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan keadilan gender. Dalam perspektif Anne Phillips, representasi politik perempuan tidak hanya mencerminkan keadilan simbolik, tetapi juga memiliki dampak nyata pada kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan (Phillips 1995). Dalam konteks perempuan pekerja migran, representasi politik ini menjadi semakin mendesak karena kondisi kerja mereka yang penuh risiko dan sering kali diabaikan dalam regulasi kebijakan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kesenjangan antara peran ekonomi mereka yang signifikan dan pengakuan atas hak-hak politik dapat menciptakan hambatan struktural.

Perempuan pekerja migran Indonesia (PPMI) memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain menyumbang devisa melalui remitansi, mereka juga berkontribusi dalam membentuk remitansi politik di negara-negara tempat mereka bekerja (Piper & Rother 2020). Namun, mengapa hak politik mereka masih sering diabaikan? Hal ini misalnya tampak pada praktik Pemilu 2024. Banyak PPMI yang kehilangan hak pilih akibat kurangnya sosialisasi dan perubahan metode pemilihan dari TPS ke pos. Fakta ini menunjukkan sebuah ironi. Peran mereka dalam ekonomi amat signifikan, kendati demikian tidak terakomodasinya hak politik mereka menunjukkan adanya persoalan tidak direkognisinya identitas mereka sebagai bagian penting dalam demokrasi Indonesia.

JP118 hendak menunjukkan bagaimana kelit-kelindan konteks pekerjaan dan pengalaman konkret PPMI perlu dikenali dan dipahami untuk dapat melihat akar permasalahan ini. Misalnya, data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2023 menunjukkan mayoritas PPMI bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT) sebanyak 61.180 orang (25,70 persen) dan pengasuh sebanyak 46.079 orang (19,36 persen). Dominasi di sektor informal ini adalah salah sekian faktor yang menghasilkan kerentanan para PPMI terhadap kekerasan, ketergantungan pada majikan, dan isolasi sosial. Kondisi ini tidak hanya membatasi ruang gerak mereka, tetapi juga menghalangi mereka dari hak-hak politik yang seharusnya dimiliki. Misalnya, minimnya waktu memengaruhi peluang PPMI untuk terlibat dalam

organisasi. Larangan dari majikan untuk cuti saat pemilu juga merupakan salah satu tantangan partisipasi politik di masa elektoral. Sejumlah temuan dari artikel JP118 menunjukkan tantangan-tantangan bagi PPMI untuk terlibat aktif dalam politik.

Kendati demikian, kesadaran politik PPMI tetap tumbuh melalui media sosial, jaringan keluarga, organisasi pekerja migran, hingga partai politik luar negeri (Kusumastuti 2024). PPMI memiliki sejumlah tantangan, tetapi mereka juga memiliki agensi dalam mendorong perubahan sosial. Dalam pemantauan pemilu 2024 misalnya, terdapat sejumlah gerakan inisiatif dan aksi kolektif dari PPMI untuk menjamin terlaksananya pemilu yang inklusif dan partisipatif.

Dalam kerangka keadilan sosial, Nancy Fraser menekankan pentingnya pengakuan identitas dan redistribusi sumber daya untuk mengatasi ketidaksetaraan struktural (Fraser 1995). Perspektif ini sangat relevan untuk memahami tantangan yang dihadapi PPMI dalam Pemilu 2024. Misalnya, di Hong Kong, 95.901 pekerja rumah tangga migran tidak dapat menggunakan hak pilih mereka akibat minimnya sosialisasi terkait perubahan metode pemilu. Di Malaysia, manipulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPT LN) menyebabkan 370 ribu suara pekerja migran hangus, memaksa pemilu di wilayah tersebut untuk diulang (Migrant CARE 2024). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem pemilu luar negeri masih jauh dari inklusif, merugikan kelompok yang seharusnya mendapatkan haknya secara setara.

Pemilu Indonesia 2024 seharusnya menjadi momentum untuk memperluas akses politik bagi PPMI. Namun, realitas menunjukkan bahwa jaminan atas pelibatan mereka dalam proses demokrasi belum menjadi prioritas negara. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk menjawab tantangan ini, dengan strategi yang mencakup pengakuan identitas sekaligus redistribusi sumber daya untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, keadilan politik bagi PPMI dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari upaya membangun diskursus tentang hak politik PPMI, Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Migrant CARE mengangkat tema ini

dalam edisi terbaru. Edisi ini menghadirkan berbagai topik penting, seperti:

- 1. Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai Arena Aktivisme Perempuan Pekerja Migran Indonesia:** Artikel ini membahas keterlibatan PPMI dalam pemilu luar negeri, tantangan administratif dan teknis yang mereka hadapi, serta usulan pembentukan daerah pemilihan khusus luar negeri.
- 2. 10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan Hak atas Perlindungan Masih Terbatas:** Artikel ini mengevaluasi kebijakan pemerintahan Jokowi terkait perlindungan pekerja migran, dengan fokus pada implementasi kebijakan berbasis HAM.
- 3. Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan Representasi Perempuan Pekerja Migran?:** Menggunakan kerangka keadilan politik Nancy Fraser, artikel ini menganalisis ketimpangan representasi politik perempuan pekerja migran.
- 4. Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Parlemen: Peluang dan Tantangan:** Artikel ini menggali pentingnya keterwakilan PPMI di parlemen berdasarkan

teori politik kehadiran Anne Phillips.

- 5. Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran pada Pemilihan Umum di Negara Penempatan:** Artikel ini membahas bagaimana kondisi kerja yang rentan memengaruhi pasivitas politik pekerja rumah tangga migran.
- 6. Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia:** Artikel ini menggunakan teori afeksi Sara Ahmed dan rekognisi Nancy Fraser untuk memahami diskriminasi dan kekerasan yang dialami PPMI.

Melalui pendekatan berbasis feminisme, edisi ini bertujuan untuk memotret sejumlah tantangan partisipasi politik PPMI sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang lebih inklusif. Edisi ini diharapkan dapat menjadi refleksi dan bahan pembelajaran untuk mendesak kebijakan serta praktik demokrasi yang lebih sensitif dan berkomitmen penuh terhadap pemenuhan hak-hak PPMI. Dengan demikian, Jurnal Perempuan edisi 118 berupaya menghadirkan narasi akademis yang kritis dan empatik terhadap realitas perempuan pekerja migran (**Abby Gina**).

**Trisna Dwi Yuni Aresta<sup>1</sup> & Titi Anggraini<sup>2</sup>**  
Universitas Indonesia

**Pemilu Luar Negeri: Di Mana Suara, Aspirasi, dan Representasi Perempuan Pekerja Migran?**

*Women Migrant Workers in Overseas Elections: Where Are Their Voices, Aspirations, and Representation?*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 89–101, 2 tabel, 25 daftar pustaka

The Overseas General Election deliberately neglects justice for Indonesian Female Migrant Workers (Perempuan Pekerja Migran Indonesia/PPMI). Structural layers of neglect occur from the formulation of regulations to their implementation. The economic contributions made by PPMI fail to be recognized by the state, as reflected in the fulfillment of their political rights during the general election. This article discusses the lost voices, aspirations, and political representation of PPMI due to poor Electoral District (Dapil) arrangements. The data in this article was gathered from 2024 monitoring activities conducted by Migrant CARE, an independent election monitoring organisation. The data was analyzed using Nancy Fraser's political justice framework, which encompasses redistribution, recognition, and representation. The article identifies two interrelated issues: (1) problems in the arrangement of Electoral Districts for overseas elections that disrupt the connection between PPMI as constituents and both candidates and elected representatives; (2) the current Electoral District policies weaken state advocacy on issues faced by PPMI. This paper proposes and advocates for establishing a Special Overseas Electoral District to accommodate the voices, aspirations, and leadership of PPMI in politics in a meaningful way, thereby achieving representative political justice.

Keywords: PPMI, Overseas Election, Jakarta II Electoral District

Pemilihan Umum Luar Negeri dengan sengaja mengabaikan keadilan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Proses pengabaian secara struktural terjadi secara berlapis sejak penyusunan regulasi hingga pelaksanaannya. Kontribusi ekonomi yang diberikan oleh PPMI gagal direkognisi negara. Hal ini tercermin dalam pemenuhan hak politik mereka selama pemilihan umum. Artikel ini membahas mengenai suara, aspirasi, dan representasi politik PPMI yang hilang akibat penataan Daerah Pemilihan (Dapil) yang buruk. Data dalam artikel ini diperoleh dari hasil pemantauan di tahun 2024 yang dilakukan oleh Migrant CARE sebagai pemantau Pemilu independen. Data hasil pemantauan dianalisis dengan kerangka berpikir Nancy Fraser yakni mengenai keadilan politik melalui konsep redistribusi, rekognisi, dan representasi. Artikel ini menemukan bahwa beberapa persoalan yang saling berhubungan, yakni (1) terdapat masalah dalam penataan Dapil untuk Pemilu di luar negeri yang justru memutus hubungan antara PPMI sebagai konstituen dengan Caleg maupun wakil rakyat terpilih; (2) kebijakan penataan Dapil saat ini berdampak pada lemahnya advokasi persoalan yang dihadapi PPMI oleh negara. Tulisan ini menawarkan dan mendorong pembentukan Dapil Khusus Luar Negeri yang dapat mengakomodir suara, aspirasi, dan kepemimpinan PPMI dalam politik secara bermakna sehingga terwujudnya keadilan politik yang representatif.

Kata kunci: PPMI, Pemilu Luar Negeri, Dapil Jakarta II

**Ayu Kusumastuti**  
Universitas Brawijaya

**Dinamika Pasivitas Politik: Preferensi-Preferensi Keterlibatan Politik Pekerja Rumah Tangga Migran pada Pemilihan Umum di Negara-Negara Penempatan**

*The Dynamics of Political Passivity: Political Engagement Preferences of Migrant Domestic Workers in Electoral Processes in Host Countries*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 103–111, 37 daftar pustaka

The enactment of Election Law Number 7 of 2017 outlines the requirements for voters, including Indonesian citizens (WNI) residing within the territory of the Republic of Indonesia or abroad. Focusing on migrant domestic workers, this paper seeks to analyze the political participation and engagement of migrant domestic workers in the political contestation of their homeland. The potential for political passivity among these workers is highly likely due to the restrictive nature of transnational caregiving work. This condition limits their freedom to engage in activities outside their work sphere, including participation in national elections. However, at the same time, they are able to identify personal barriers they face as a consequence of not participating in elections. Migrant domestic workers exhibit the characteristics of monitorial citizens, individuals who monitor and respond to election-related information amidst restrictive work patterns, while also developing alternative forms of political participation outside of electoral processes.

Keywords: women, migrants, domestic workers, home country, elections, participation

Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan tentang syarat pemilih yang meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri. Dengan fokus pada pekerja rumah tangga (PRT) migran, tulisan ini berusaha untuk menganalisis partisipasi politik dan keterlibatan PRT migran dalam kontestasi politik tanah air. Potensi pasivitas politik yang dialami oleh para pekerja ini sangat mungkin terjadi karena proses kerja perawatan transnasional yang sangat mengikat. Hal ini menyebabkan PRT migran tidak memiliki kebebasan beraktivitas di luar ranah kerja, termasuk berpartisipasi dalam pemilu tanah air. Namun di saat bersamaan, mereka dapat mengenali hambatan-hambatan personal yang dialami sebagai konsekuensi tidak berpartisipasi dalam pemilu. PRT migran menunjukkan karakteristik monitorial citizen, yaitu individu yang memantau dan merespons informasi terkait pemilu di tengah pola kerja yang restriktif, sekaligus disertai mengembangkan alternatif partisipasi politik di luar partisipasi dalam pemilu.

Kata kunci: perempuan, migran, pekerja domestik, negara asal, pemilu, partisipasi

**Wahyu Susilo**

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

**Pemilu Indonesia di Luar Negeri sebagai Arena Aktivisme Perempuan Pekerja Migran Indonesia**

### *Indonesian Overseas Elections as an Arena of Activism for Indonesian Women Migrant Workers*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 113–125, 42 daftar pustaka

Although since the first Indonesian general election was held in 1955, it has guaranteed political rights, especially the right to vote, for Indonesian citizens who are abroad, but in the development of policies on elections in Indonesia there has been no adequate policy update. Women Indonesian migrant workers who are the face of the majority of Indonesian citizens abroad have not participated in the implementation of Indonesian elections abroad and also have not felt the direct benefits of organising Indonesian elections abroad. This research traces the emergence of overseas election monitoring activities and political education of Indonesian migrant workers. These initiatives have encouraged the political activism of Indonesian migrant workers to ensure that Indonesian elections abroad are more qualified, responsive to the migrant worker protection agenda and encourage the representation of migrant workers in legislative political representation contested in elections.

Keywords: politic activism, parliament, overseas election, Indonesian women migrant workers

Meskipun sejak pemilihan umum Indonesia pertama kali digelar pada tahun 1955 telah menjamin hak politik, khususnya hak pilih, bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, namun dalam perkembangan kebijakan tentang pemilihan umum di Indonesia belum ada pembaruan kebijakan yang memadai. Para perempuan pekerja migran Indonesia yang merupakan wajah mayoritas warga negara Indonesia di luar negeri belum banyak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri dan juga belum merasakan manfaat langsung dari penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri. Riset ini menelusuri adanya kemunculan aktivitas pemantauan pemilu Indonesia di luar negeri dan pendidikan politik pekerja migran Indonesia. Inisiatif tersebut telah mendorong adanya aktivisme politik pekerja migran Indonesia untuk memastikan pemilu Indonesia di luar negeri lebih berkualitas, responsif pada agenda perlindungan pekerja migran dan mendorong adanya representasi pekerja migran dalam keterwakilan politik legislatif yang dikontestasikan dalam pemilu.

Kata kunci: aktivisme politik, parlemen, pemilu luar negeri, perempuan pekerja migran Indonesia

---

#### **Ana Sabhana Azmy**

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **Representasi Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Parlemen: Peluang dan Tantangan**

*Political Representation of Indonesian Migrant Women Workers (PPMI) in Parliament: Opportunities and Challenges*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 127–140, 1 tabel, 32 daftar pustaka

The absence of Indonesian women migrant workers (Perempuan Pekerja Migran Indonesia/PPMI) in parliament reflects the unfulfilled political rights of citizens. With various problems of election violations such as double DPT, overseas election systems that are vulnerable to manipulation through postal and drop box methods indicate the vulnerability of the distribution of voting rights as a political right of a migrant worker, where the majority of migrant workers are women who work in the informal sector. The presence of migrant workers in parliament is important to accommodate political rights, both voting rights and the distribution of opinions. Their political representation in parliament will reflect the implementation of democratic values, and

be a positive example for other women in politics, especially in the context of gender justice. This paper uses the gender justice framework of Squires, the political theory of presence from Anne Phillips, and the representation theory from Hanna Pitkin to discuss the urgency of representation of women migrant workers in parliament as a reflection of the fulfillment of political rights. The research method used is a critical and in-depth analysis of relevant literature studies.

Keywords: political representation, women migrant workers, parliament

Absennya kehadiran Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di parlemen mencerminkan belum terpenuhinya hak politik warga negara. Berbagai persoalan pemilu, seperti DPT ganda dan sistem pemilu di luar negeri yang rentan dimanipulasi melalui metode pos atau drop box, menunjukkan kerentanan penyaluran hak pilih bagi PPMI. Mayoritas PPMI adalah perempuan yang bekerja di sektor informal sehingga kendala ini kian membatasi pemenuhan hak politik mereka. Kehadiran PPMI di parlemen menjadi penting untuk mengakomodasi hak politik, baik hak pilih maupun penyaluran pendapat. Representasi politik mereka di parlemen akan merefleksikan penerapan nilai-nilai demokrasi dan menjadi contoh positif bagi perempuan lain di dunia politik, terutama dalam konteks keadilan gender. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran keadilan gender dari Squires, teori politik kehadiran dari Anne Phillips dan teori representasi dari Hanna Pitkin untuk membahas urgensi keterwakilan PPMI di parlemen sebagai refleksi pemenuhan hak politik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kritis dan mendalam terhadap studi pustaka yang relevan.

Kata kunci: representasi politik, perempuan pekerja migran, parlemen

---

#### **Savitri Wisnu Wardhani**

Migrant CARE dan Pegiat di Jaringan Buruh Migran (JBM)

### **10 Tahun Kebijakan Jokowi dalam Perlindungan Pekerja Migran: Pemenuhan Hak atas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masih Terbatas**

*10 Years of Jokowi's Policy on the Protection of Migrant Workers: Fulfillment of the Right to Protection for Indonesian Migrant Workers is still Limited*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 141–156, 4 tabel, 26 daftar pustaka

The migration of Indonesian migrant workers has brought positive contributions to economic development in both the countries of origin and destination of Indonesian migrant workers. In an effort to provide protection for Indonesian migrant workers, the government has issued Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and has carried out several protection initiatives. However, cases experienced by Indonesian migrant workers for 10 years actually show a lack of protection efforts for them. Women migrant workers in the informal sector are even more vulnerable to violence. This is due to the policy perspective that is more targeted at the area of economic gain than protection. Qualitative method exploration was carried out through the collection of literature study data and compilation of policy data for Indonesian migrant workers during the 10 years of President Joko Widodo's administration. The findings of this study indicate that there is a lack of commitment to protection efforts due to the lack of involvement of the experiences of Indonesian migrant workers in the process and implementation of policies. This study also proposes further steps that need to be taken to improve policies and implementation related to the protection of migrant workers.

Keywords: feminization of migration, policy implementation, development planning, Indonesian women migrant workers, protection of Indonesian migrant workers

Migrasi pekerja migran Indonesia telah membawa kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun

negara tujuan pekerja migran Indonesia. Dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan telah melakukan beberapa inisiatif perlindungan. Namun, kasus yang dialami pekerja migran Indonesia selama 10 tahun justru menunjukkan kurangnya usaha perlindungan bagi mereka. Perempuan pekerja migran di sektor informal bahkan lebih rentan mengalami kekerasan. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang kebijakan yang lebih menasar pada wilayah keuntungan ekonomi ketimbang pada perlindungan. Penelusuran metode kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data studi kepustakaan dan kompilasi data kebijakan bagi pekerja migran Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya komitmen atas upaya perlindungan akibat tidak dilibatkannya pengalaman pekerja migran Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah lebih lanjut yang perlu diambil untuk meningkatkan kebijakan dan implementasi terkait perlindungan pekerja migran.

Kata kunci: feminisasi migrasi, implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan, perempuan pekerja migran Indonesia, perlindungan pekerja migran Indonesia

---

**Ikhaputri Widiyanti<sup>1</sup> & Abby Gina Boang Manalu<sup>2</sup>**

Universitas Indonesia<sup>1&2</sup> & Jurnal Perempuan<sup>1&2</sup>

### **Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia**

*Affection and Political Awareness of Indonesian Migrant Women Workers*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 2, 2024, hlm. 157–167, 18 daftar pustaka

The problems experienced by Indonesian female migrant workers both in their own country and in the destination country show how vulnerable they are to violence. Most of them are workers in the informal

sector such as domestic and care workers, who are categorized as low-skilled workers. As a result of this categorization, they often experience discrimination and even violence. This is the impact of neglecting experiences, especially in fulfilling political rights, which hinders full access to policy guarantees that protect them. Data were collected using literature analysis and secondary research. This study uses a philosophical approach based on Sara Ahmed's theory of affection and Nancy Fraser's recognition of how the experiences of Indonesian female migrant workers need to include empathetic emotional values and recognition of the political rights of Indonesian female migrant workers. The findings of this article highlight the importance of fostering political awareness through the integration of affection and recognition in understanding and overcoming the political injustice of Indonesian female migrant workers.

Keywords: affection, political awareness, Indonesian Female Migrant Workers, recognition

Persoalan yang dialami perempuan pekerja migran Indonesia baik di dalam negara sendiri maupun di negara tujuan bekerja menunjukkan betapa mereka adalah warga negara yang rentan mengalami kekerasan. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga dan perawatan, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja berketerampilan rendah. Akibat pengategorian ini, mereka sering kali mengalami diskriminasi bahkan kekerasan. Hal ini merupakan dampak dari pengabaian pengalaman terutama dalam pemenuhan hak politik yang menghambat akses penuh atas jaminan kebijakan yang melindungi mereka. Data dikumpulkan menggunakan analisis literatur dan riset sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang berdasarkan penelusuran teori afeksi dari Sara Ahmed dan rekognisi dari Nancy Fraser untuk bagaimana pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia perlu memasukkan nilai emosi yang empatik dan pengakuan hak politik perempuan pekerja migran Indonesia. Temuan tulisan ini menyoroti pentingnya menumbuhkan kesadaran politik melalui integrasi antara afeksi dan rekognisi dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan politik perempuan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: afek, kesadaran politik, Perempuan Pekerja Migran Indonesia, rekognisi.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

